

**BAB IV**

**PERBEDAAN KEBIJAKAN KONTRATERORISME AS TERHADAP ISIL  
DAN BOKO HARAM DARI SUDUT PANDANG LIBERAL  
INTERNASIONALISME**

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai perbedaan kontraterorisme AS terhadap Boko Haram dan ISIL serta analisis *state behavior* dari sudut pandang teori realis. Bagian pertama dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai geopolitik dan kepentingan AS di Suriah serta hubungan AS dan Suriah, yang selanjutnya dalam bagian kedua bab ini, penulis akan menjelaskan analisis kebijakan AS dalam usahanya untuk melakukan pergantian rezim di Suriah dari Basar al-Assad ke pemerintahan yang lebih “demokratis” dan lebih pro-barat dengan menggunakan paradigma liberalis internasional.

**4.1. Geopolitik dan Kepentingan AS di Suriah**

Dalam bab sebelumnya, dijelaskan mengenai hubungan Rusia yang dekat dengan Suriah dan kepentingan Rusia yang ingin mempertahankan pemerintahan Bashar al-Assad. Berbeda dengan Rusia yang telah menjalin hubungan baik dengan Suriah, AS dan Suriah tidak memiliki hubungan diplomatis yang erat dan cenderung ke arah permusuhan. AS dan Suriah pertama kali menjalin hubungan diplomatik pada 1944 setelah Suriah memproklamkan kemerdekaan dari Perancis. Hubungan diplomatik tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 1967, AS dan Suriah

memutuskan hubungan diplomatik. Hubungan keduanya semakin keruh pasca AS memasukkan Suriah ke daftar negara sponsor terorisme pada 29 Desember 1979 (Department of State, t.thn.). Penggolongan Suriah ke negara sponsor terorisme dijelaskan oleh AS sebagai berikut:

*...the Assad regime continued its political and military support to a variety of terrorist groups affecting the stability of the region as the Syrian conflict entered its sixth year. The regime continued to provide political and weapons support to Hezbollah and continued to allow Iran to rearm the terrorist organization ... Over the past decade, the Syrian government has played an important role in the growth of terrorist networks in Syria through the Assad regime's permissive attitude towards al-Qaida and other terrorist groups' foreign terrorist fighter facilitation efforts during the Iraq conflict. (U.S. Department of State, t.thn.)*

AS dan Suriah sempat terlibat dalam kerjasama regional, namun situasi kembali keruh ketika pemerintahan Suriah tidak dapat mengendalikan masuknya *foreign fighters* ke Irak, keenggannya untuk mendeportasi pengikut rezim Saddam Husein yang turut terjun ke dalam pemberontakan di Irak dan obsesinya terhadap senjata pemusnah massal. AS semakin memojokkan Suriah dengan isu-isu HAM dan menerapkan sanksi ekonomi yang 'mengisolasi' Suriah, sehingga bukan sebuah anomali jika hubungan keduanya tidak harmonis dan Suriah lebih menyukai Rusia.

Sanksi-sanksi yang diterapkan oleh AS terhadap Suriah meliputi sanksi-sanksi ekonomi yaitu *Executive Orders 13608 Prohibiting Certain Transaction with and Suspending Entry to United States of Foreign Sanction Evaders with Respect to Syria and Iran* (efektif sejak 1 Mei 2012); *Executive Orders 13606 Blocking the Property and Suspending Entry into the United States of Certain Persons with Respect to Grave*

*Human Rights Abuses by the Government of Iran and Syria via Information Technology* (efektif sejak 23 April 2012); *Executives Order 13582 Blocking Property of the Government of Syria and Prohibiting Transactions with Respect to Syria* (efektif sejak 18 Agustus 2011); *Executives Order 13573 Blocking Property of Senior Officials of the Government of Syria* (efektif sejak 18 Mei 2011); *Executives Order 13572 Blocking Property of Certain Persons with Respect to Human Rights Abuses in Syria* (efektif sejak 29 April 2011); *Executives Order 13338 Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting the Export of Certain Goods to Syria* (efektif sejak 12 Mei 2004) (U.S. Department of Treasury 2018).

Sementara itu, kepentingan Rusia dan agendanya untuk kembali menjadi negara hegemonik menghambat kepentingan-kepentingan AS di Suriah. Rusia dan AS memang memiliki satu kepentingan yang sama, yaitu melaksanakan kontraterorisme ISIL dan mencegah penyebarluasan ‘radikalisme’ yang berpotensi mengancam kedaulatan wilayah domestik masing-masing, namun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap kedudukan Assad di pemerintahan Suriah. Tujuan utama AS adalah untuk membasmi ISIL, tetapi mengakhiri perang sipil Suriah, membendung pengaruh Rusia di Timur Tengah dan menurunkan Assad dari kepresidenan juga merupakan beberapa kepentingan AS (Herrera, Kydd and Lukyanov 2015, 4).

Dalam usaha AS untuk mengembalikan kestabilan di Suriah dan mengakhiri perang sipil, PBB bersama utusan khusus untuk Suriah, Staffan de Mitsura, mengadakan dua konferensi di Wina, Austria pada tahun 2015 (30 Oktober dan 14

November 2015) dan membentuk *International Syria Support Group*, dimana Rusia dan AS merupakan ketua *joint-group*. Deklarasi Wina menghasilkan beberapa poin dengan merujuk ke Konferensi Jenewa II untuk Suriah (2012)<sup>1</sup> yang meliputi pergantian sistem politik dan rezim akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Suriah, *owned and led*; PBB akan mengundang pemerintah Suriah dan grup oposisi untuk memulai mediasi terkait proses politik untuk mengakhiri konflik yang tengah berlangsung, dan diwajibkannya gencatan senjata dan perbanyak bantuan kemanusiaan.

Selain usaha negosiasi, AS juga memberikan bantuan berupa *nonlethal assistance* untuk Suriah dan kelompok oposisi yang disetujui oleh FY2016 dan dilaksanakan oleh *International Narcotics and Law Enforcement (INCLE)* dan *Peacekeeping Operations (PKO)* dimana program tersebut bertujuan untuk mendirikan pemerintahan Suriah yang representatif, inklusif dan akuntabel; memperluas peran perempuan dalam negosiasi untuk mengakhiri kekerasan di Suriah dalam pergantian rezim; mengembangkan dan mengimplementasikan pergantian rezim yang demokratis, transparan dan taat hukum; mengembangkan masyarakat sipil dan media independen Suriah; mendokumentasikan, menginvestigasi dan mempersekusi pelanggaran HAM di Suriah; mengembangkan ideologi kontra-ekstrimisme; memberikan asistensi untuk

---

<sup>1</sup> Konferensi Jenewa II untuk Suriah dilaksanakan pada tahun 2012 dengan tujuan ‘mendamaikan’ konflik di Suriah dengan mengundang pemerintahan Suriah dan beberapa kelompok oposisi. Konferensi Jenewa II membahas proses pergantian rezim di Suriah yang pada akhirnya tidak disetujui oleh pihak Suriah, yang menolak untuk menurunkan Bashar al-Assad dari kedudukannya (BBC 2014).

menyelesaikan pendidikan kepada para pengungsi perang sipil Suriah, dan; memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok rawan di perbatasan Suriah (Blanchard, Humud and Nikitin 2016, 22).

Meskipun usaha negosiasi untuk proses pergantian rezim ini tidak pernah berjalan lancar, AS tetap mempercayai bahwa satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri perang sipil adalah dengan menurunkan Presiden Al-Assad dari jabatannya dan mendirikan institusi yang demokratik. Keteguhan AS pada pendapatnya bahwa pergantian rezim otokrasi ke rezim yang lebih demokratis akan mengakhiri konflik dapat dianalisis dari sudut pandang liberal internasionalisme yang berfokus pada ide dasar bahwa demokrasi adalah penangkal dari konflik dalam sistem internasional. Akan ditinjau pula konsep kepentingan nasional dari sudut pandang liberalis, yang menekankan kepada terwujudnya perdamaian internasional.

#### **4.2. Analisis Kebijakan AS di Suriah melalui Sudut Pandang Liberal Internasionalisme**

Dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai persaingan politik antara Rusia dan AS yang semakin memperkeruh perang sipil di Suriah dan usaha AS untuk mengalahkan ISIL. Bagian ini akan menjelaskan mengenai kepentingan AS di Suriah, lebih spesifik mengenai kepentingannya untuk mengakhiri perang sipil di Suriah dan menurunkan Assad dari jabatannya sebagai justifikasi mengapa ia lebih terlibat dalam usaha kontraterorisme ISIL dibandingkan Boko Haram.

AS memiliki kepentingan untuk mengakhiri perang sipil di Suriah, menjaga kestabilan regional dan perdamaian global, serta menekan munculnya kelompok-kelompok radikal islamis yang memiliki sentimen anti-barat (Herrera, Kydd and Lukyanov 2015). Demi terwujudnya perdamaian dan berakhirnya perang sipil tersebut, Assad harus diturunkan dari jabatannya sebagai presiden Suriah dan mengganti rezim otoritariannya ke rezim yang lebih demokratis. Sudut pandang liberalis beranggapan bahwa perdamaian merupakan hal yang wajar, sehingga bila terjadi perang, hal tersebut dikarenakan oleh pemerintahan militaristic dan tidak demokratis. Kant menyebutkan bahwa solusi dari peperangan yang terjadi adalah dengan menyebarkan paham liberalisme dan menambah jumlah negara yang menganut sistem demokrasi, yang kemudian ditambahkan oleh Doyle yang menyebutkan bahwa negara-negara liberal-demokrasi memiliki sifat unik dimana mereka dengan sukarela membangun hubungan yang damai dengan satu sama lain. Menurut Doyle, sinkronisasi negara-negara liberal-demokrasi yang memiliki prinsip yang sama, yakni komitmen terhadap hukum; hak individual dan kesetaraan dihadapan hukum; dan pemerintahan yang didasarkan oleh konsesus, dapat berarti bahwa negara-negara tersebut tidak tertarik untuk memulai konflik dengan satu sama lain (Doyle 1986, 1161). Rawls kemudian menambahkan meski negara-negara liberal-demokratis memiliki ketertarikan yang kecil untuk memulai konflik dengan negara-negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi, mereka akan melakukan *self-defense* (secara militeristik, baik untuk diri sendiri ataupun aliansi) atau untuk mengintervensi kasus-kasus pelanggaran HAM yang sangat berat (Rawls 1999, 49).

Paradigma liberal berpendapat bahwa perdamaian merupakan hal yang diharapkan dari sistem internasional. Pemikiran tersebut kemudian diterapkan sebagai landasan dari banyak kebijakan luar negeri negara-negara yang menganut sistem liberal-demokrasi, termasuk AS. Pemikiran ini secara umum beranggapan bahwa demokrasi adalah sistem politik yang ideal yang dapat menciptakan perdamaian domestik maupun internasional sehingga penyebaran sistem politik yang liberal dan demokratis merupakan suatu kewajiban. Pandangan ini juga sering disebut sebagai Wilsonianisme dan menjadi ciri khas kebijakan luar negeri AS yang dijelaskan sebagai, “... *aims at expanding democracy and free trade, at defending democracy from its foes, at quarantining repressive and pariah states, and at protecting and promoting human rights.*” (Hoffman 1995, 159)

Paradigma ini juga beranggapan bahwa absennya sistem politik yang demokratis membuat negara dunia ketiga (dalam hal ini merujuk ke negara-negara yang tidak menganut sistem liberal-demokratis) rawan perang dan terorisme (Jahn 2013, 77) sehingga dalam proses untuk menciptakan perdamaian internasional, negara-negara yang tidak menganut sistem liberal-demokratis dapat menjadi sasaran penyebaran demokrasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional dalam pandangan liberal internasionalisme merupakan penyebaran paham demokrasi terhadap negara-negara non-liberal untuk menjaga perdamaian domestik dan internasional (Jahn 2013, 75). Menurut logika tersebut, sikap AS yang gigih dalam

usahanya untuk melakukan pergantian rezim di Suriah merupakan upaya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian.

Mempromosikan demokrasi tidak hanya mempromosikan nilai-nilai dasar yang diemban oleh AS seperti kebebasan beragama dan perjuangan untuk hak-hak pekerja, namun juga membantu menciptakan sistem internasional yang lebih aman, stabil dan mapan secara ekonomi dimana AS dapat mencapai kepentingan nasionalnya dengan lebih leluasa. Dengan maksud tersebut, penyebaran demokrasi sebagai kebijakan luar negeri AS berkomitmen untuk: 1) mempromosikan demokrasi sebagai cara untuk mencapai keamanan, kestabilan dan kemapanan sistem internasional; 2) memberikan asistensi terhadap institusi demokrasi yang baru terbentuk; 3) memberikan asistensi terhadap penggiat advokasi demokrasi untuk mewujudkan sistem demokrasi yang unik di negara masing-masing; 4) mengidentifikasi dan mengkritik pemerintahan yang tidak memberikan hak untuk mengadakan pemilihan umum yang bebas dan aman bagi penduduknya (U.S. Department of State, t.thn.).

Promosi dan advokasi demokrasi dilakukan oleh AS dengan cara menjalin kerjasama bilateral maupun multilateral dibidang advokasi demokrasi, *foreign assistance programs* dan pertukaran kebudayaan. AS juga memberikan asistensi demokrasi yang mencakup asistensi untuk institusi yang demokratik, asistensi pemilihan umum, asistensi untuk memperkuat institusi hukum yang mencakup HAM, serta asistensi untuk mengawal kebebasan pres. Kebijakan luar negeri AS dalam mempromosikan demokrasi mendapat dukungan dari kongres dan mendapatkan



alokasi dana sebesar US\$ 2 Milyar setiap tahunnya, dimana wewenang untuk melakukan asistensi tersebut dipegang oleh USAID (Lawson and Espetin 2017, 12).

Kebijakan mempromosikan demokrasi menjadi sangat terlihat dalam kebijakan luar negeri AS terutama sejak pemerintahan Bush, pasca 9/11. Pemerintahan Bush menegaskan bahwa kurangnya demokrasi di semenanjung Arab menyebabkan munculnya ide-ide ekstrimisme di daerah tersebut dan penyebaran demokrasi dipercaya dapat menekan pertumbuhan ide-ide ekstrimis (Lawson and Espetin 2017, 6). Administrasi Bush juga meluncurkan *Middle East Partnership Initiative* (MEPI)<sup>2</sup> sebagai bukti komitmennya untuk menyebarkan demokrasi di Timur Tengah. Kebijakan luar negeri pro-demokrasi Bush kemudian dilanjutkan oleh Obama, dimana kebijakan yang berkaitan dengan promosi demokrasi juga difokuskan pada Timur Tengah. Secara khusus, AS menyatakan bahwa mereka mendukung penuh aspirasi masyarakat Suriah yang menginginkan Suriah yang demokratik, damai dan inklusif melalui pembentukan *International Syria Support Group* dan memberikan asistensi berupa dana dan bantuan sebanyak US\$ 1.65 juta pada tahun 2016 (Foreign Assistance 2018).

Untuk menegaskan keinginan AS dalam pergantian rezim di Suriah dan mengimplementasikan sistem demokrasi, Presiden Obama menyatakan bahwa:

---

<sup>2</sup> MEPI bertujuan untuk meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan di area Timur Tengah dengan cara memberikan dukungan terhadap pemerintahan negara-negara Timur Tengah dalam mencapai pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat serta ekonomi dan pasar yang terbuka (U.S. Department of State, t.thn.).

[cetakan tebal dari penulis] ... *the United States has joined with nations around the world in calling for an end to the Assad regime and a transition that **leads to a peaceful, inclusive and democratic Syria**, where the rights of all Syrians are protected.* (White House Office of Secretary 2013)

Pernyataan Presiden Obama di atas kemudian diperkuat oleh pernyataan Menteri Pertahanan AS John Kerry, yang juga menegaskan pentingnya pergantian rezim ke pemerintahan yang lebih demokratis dan determinasi AS untuk membangun sistem yang demokratik di Suriah sebagai salah satu upayanya dalam kontraterorisme ISIL:

[cetakan tebal dari penulis] ... *the outcome that we are aiming for is one in which Bashar al Assad and those who have been associated with his atrocities in Syria are removed, but the structures of government ... remain in an inclusively governed way that is multi-sectarian to include Alawites and others and that can then turn to the task of regaining its sovereign territory from ISIL ... **That is the post-Assad transition that will be the best for the Syrian people and the best for our counter-ISIL strategy.*** (Blanchard, Humud and Nikitin 2016, 16)

Keinginan AS untuk melakukan pergantian rezim juga didasari oleh anggapan AS bahwa Assad telah bertindak sewenang-wenang dan melakukan pelanggaran HAM yang menyebabkan terjadinya eskalasi konflik. Presiden Obama juga kemudian menegaskan pentingnya demokrasi untuk negara-negara seperti Suriah, dimana beliau dalam pidatonya menyatakan bahwa:

[cetakan tebal dari penulis] ... *When people are oppressed, and human rights are denied -- particularly along sectarian lines or ethnic lines -- when dissent is silenced, it feeds violent extremism. It creates an environment that is ripe for terrorists to exploit. ... **And so we must recognize that lasting stability and real security require democracy.** That means free elections where people can choose their own future, and independent judiciaries that uphold the rule*

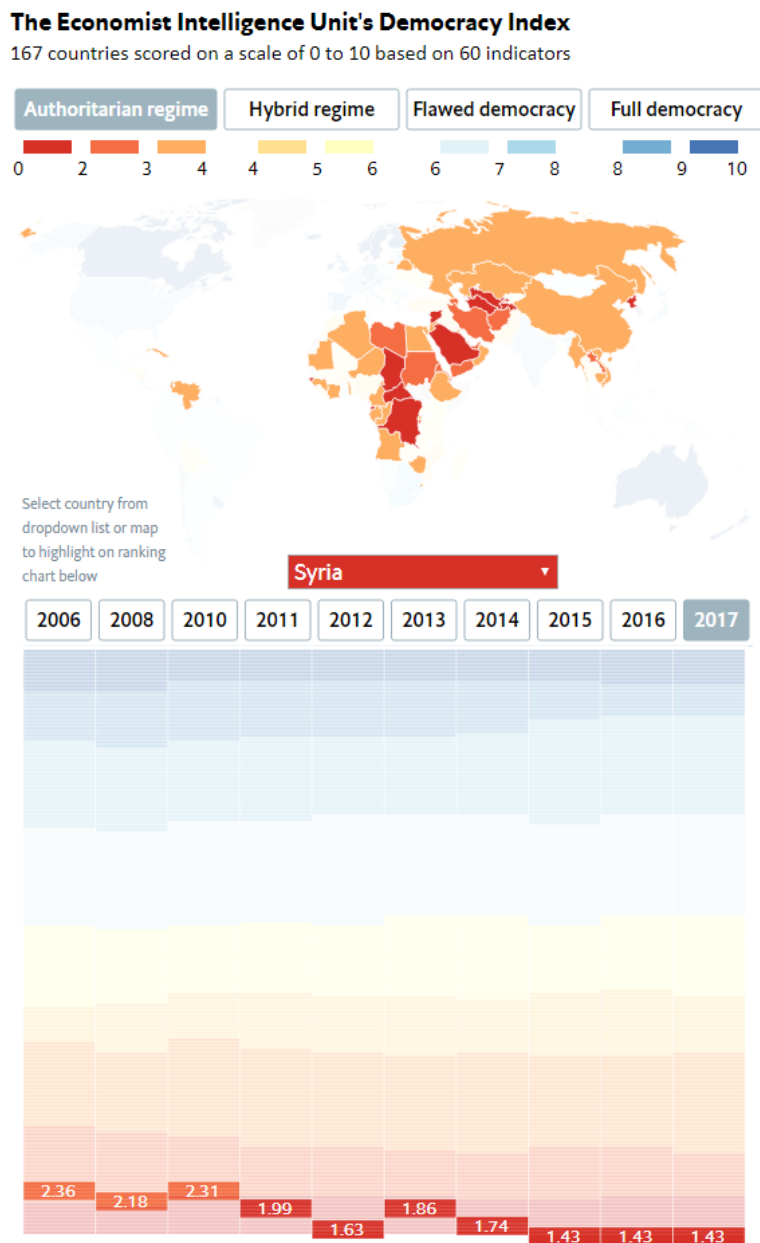
*of law, and police and security forces that respect human rights, and free speech and freedom for civil society groups.* (White House 2015)

Dalam pernyataan di atas, Presiden Obama mengajak para pemimpin negara-negara demokrasi untuk mengingat pentingnya keberadaan demokrasi itu sendiri dan menggarisbawahi *political grievances* yang ditimbulkan akibat terjadinya terorisme. Sementara itu, urgensi AS untuk terus mengawasi pergantian rezim di Suriah dijelaskan oleh Menteri Luar Negeri AS Tillerson:

[cetak tebal dari penulis] *...a stable, unified, independent Syria will serve the national security interests of the United States, its allies, and our partners. If that reality can come to pass, it will be a victory for all, and it will support the ability of the Syrian people to pursue their own God-given rights of life, liberty and the pursuit of happiness.*" (USAID 2018).

Dalam pernyataan tersebut, kepentingan AS dan sekutu yang disebut oleh Tillerson ialah perdamaian global yang dicapai setelah selesainya perang sipil pasca diturunkannya Assad dari jabatannya dan keberhasilan dalam kontraterorisme ISIL, seperti yang telah dijelaskan di atas. AS mempercayai bahwa dengan menurunkan Assad dan mendirikan institusi yang demokratis, tujuan utama AS yang merupakan kontraterorisme ISIL akan lebih mudah untuk dieksekusi. Seperti yang dijelaskan di atas pula, dalam pandangan liberal internasionalisme, negara yang tidak demokratis memiliki potensi menjadi *breeding ground* paham-paham terorisme dan hal tersebut ingin dihindari oleh AS melalui usahanya untuk mengimplementasikan institusi yang demokratis. Keinginan AS untuk membentuk institusi yang demokratis juga sejalan dengan aspirasi masyarakat Suriah yang menginginkan adanya demokrasi di Suriah.

Selanjutnya, sikap AS yang bersikeras ingin mendirikan institusi demokrasi dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti rendahnya tingkat demokrasi di Suriah. Ditinjau dari indeks demokrasi yang secara berkala diterbitkan oleh *The Economist's Intelligent Unit* (EIU), Suriah merupakan salah satu negara otoritarian dengan tingkat demokrasi terendah di peringkat 166 dari 167 negara yang terdaftar, hanya satu tingkat di atas Korea Utara dengan nilai rata-rata 1.43 (*The Economist's Intelligent Unit* 2016, 11). Paramater yang digunakan oleh EIU dalam menilai demokrasi 167 negara-negara tersebut adalah: 1) apakah pemilihan umum dilaksanakan secara adil dan bebas; 2) keamanan individual pemilih terjamin atau tidak; 3) ada atau tidaknya pengaruh asing di dalam pemerintahan, serta; 4) kesanggupan pekerja sipil/pemerintahan untuk mengimplementasikan kebijakan (U.S. Department of Defense 2016, 54). EIU juga melakukan penilaian yang melingkupi: 1) proses pemilihan umum dan pluralisme; 2) kinerja pemerintahan; 3) partisipasi politik; 4) budaya politik yang demokratis dan; 5) kebebasan sipil (*The Economist's Intelligent Unit* 2016, 66). Secara spesifik, gambar di bawah akan menjelaskan tingkat demokrasi di pemerintahan Suriah:



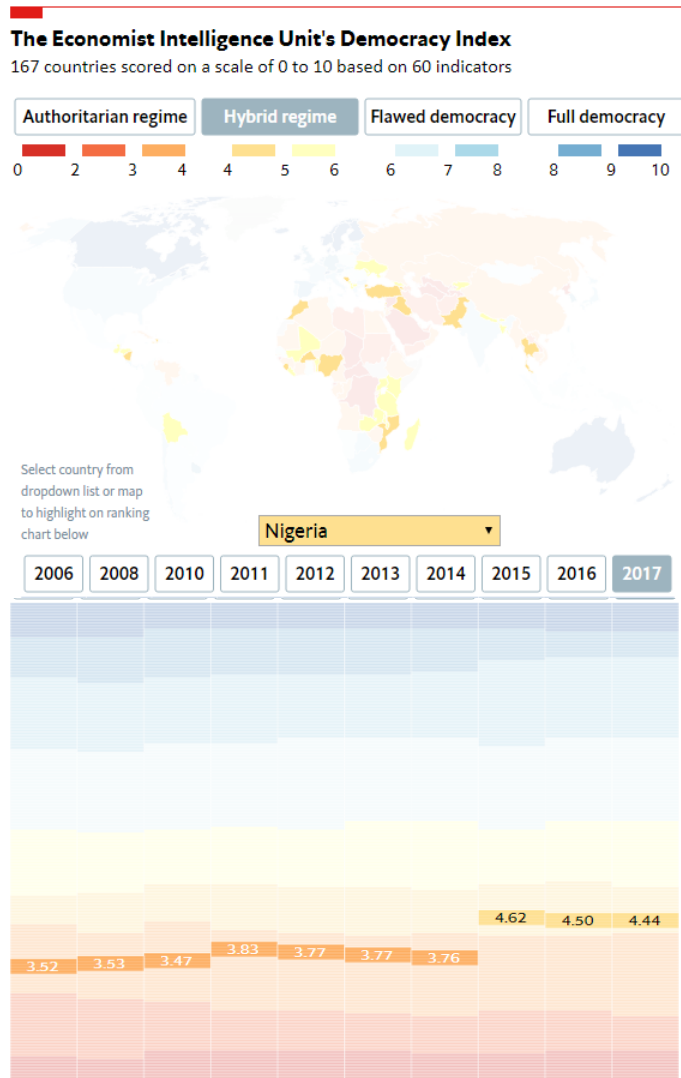
**Gambar 4.1 & 4.2: Indeks Demokrasi di Suriah tahun 2006 – 2017**

Sumber: The Economist Intelligence Unit. *The Economist Intelligence Unit's Democracy Index*. 2018. (The Economist Intelligence Unit t.thn.)

Gambar di atas menunjukkan bahwa pemerintahan Suriah termasuk dalam rezim otoriter, yang dalam penilaian EIU berada di urutan ke-166 dari 167 negara yang diamati. Tingkat demokrasi di Suriah juga dapat diamati semakin menurun dari tahun ke tahun, terutama pasca pecahnya Perang Sipil Suriah di tahun 2011. Menurut sudut pandang pemerintahan AS sendiri, pemerintahan Suriah yang dipegang oleh Dinasti Assad selama lebih dari dua dekade dinilai tidak demokratik. AS menilai bahwa rekam jejak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan Suriah terhadap warga sipilnya menjadi salah satu alasan kuat mengapa AS menginginkan berdirinya institusi yang demokratik di Suriah, seperti yang dijelaskan oleh kutipan berikut: “...*democratic societies are less likely to launch aggression and war against their neighbors or their own people. They are also less likely to experience state failure and become breeding grounds for instability and terrorism, as we have seen, for example, in Syria.*” (Abrams, Elliot 2016). Selain itu, AS yang memberikan bantuan dalam asistensi demokrasi untuk mendirikan institusi yang demokratik seperti yang diinginkan oleh masyarakat Suriah membuktikan bahwa AS menganggap Suriah sangat membutuhkan institusi yang memegang prinsip demokrasi.

Sebagai pembandingan, dalam indeks demokrasi dari sumber yang sama, Nigeria menempati peringkat ke-109 dengan skor rata-rata 4.50 dan tergolong dalam kelompok

*hybrid regime*<sup>3</sup> (The Economist's Intelligent Unit 2016, 10). Gambar di bawah akan lebih lanjut menunjukkan demokrasi di Nigeria dari tahun 2006 hingga 2017.



<sup>3</sup> Definisi *hybrid regime* menurut *The Economist Intelligence Unit* adalah “... *election have substantial irregularities that prevent them from both being free and fair. Government pressures on opposition parties may be common. ... corruption tends to be widespread and the rule of law is weak. Judiciary is not independent.*” (The Economist's Intelligent Unit 2016, 54)

### **Gambar 4.3 & 4.4: Indeks Demokrasi di Nigeria tahun 2006 – 2017**

Sumber: The Economist Intelligent Unit. *The Economist Intelligence Unit's Democracy Index*. 2018. (The Economist Intelligence Unit t.thn.)

Menurut grafik di atas, demokrasi di Nigeria justru semakin meningkat meski terjadinya peningkatan aktivitas Boko Haram di tahun 2014. Meskipun dalam pemerintahan Nigeria korupsi merupakan sebuah ‘penyakit’ yang susah diberantas, Nigeria telah menerapkan pemilihan umum dalam memilih pemerintahannya. Pemilihan Presiden tahun 2015 merupakan kesuksesan demokrasi di Nigeria, dimana pemilihan umum yang dilaksanakan transparan dan damai. Presiden Obama memuji berjalannya pemilu di Nigeria pada 2015, menyatakan bahwa, “...*The last few days have shown the world the strength of Nigeria’s commitment to democratic principles ... Nigeria’s Independent National Election Commission (INEC) and its Chairman, Attahiru Jega, deserve special recognition for what independent international observers have deemed a largely peaceful and orderly vote.*” (White House 2015). Presiden Obama yang menyatakan bahwa Nigeria telah berkomitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi menunjukkan bahwa AS memandang demokrasi di Nigeria lebih baik dari Suriah. Selanjutnya, AS terus memberikan bantuan terkait pengawalan demokrasi di Nigeria, yang dijelaskan sebagai, “...*supporting Nigerian efforts to strengthen democratic institutions, promote good governance and counter corruption, and improve security.*” (U.S. Department of State 2018).



Secara umum, pemerintahan AS menilai Nigeria memiliki tingkat demokrasi yang cukup baik. Pasca pemilihan umum tahun 2015 yang sukses, Nigeria dianggap telah, “... (*Nigeria*) has now held five successive multiparty democratic elections and is enjoying the longest period of civilian rule since its independence ... More importantly, with a population of 180 million people, it is Africa’s largest democracy — and the sixth largest democracy in the world.” (Carson 2015). Dalam bantuan bilateralnya, AS memberikan bantuan berupa asistensi demokrasi untuk mendukung perkembangan Nigeria sebagai negara demokrasi, yang berbeda dengan tujuan utama AS dalam memberikan bantuan asistensi demokrasi di Suriah yang memiliki tujuan utama untuk membantu Suriah mendirikan institusi yang demokratik. Dari jumlah dana yang telah dialokasikan, pada tahun 2016 AS menghabiskan dana sebanyak US\$ 6.89 juta untuk Nigeria yang dialokasikan untuk bantuan di bidang Demokrasi, HAM dan Pemerintahan (Foreign Assistance 2018), sementara US\$ 40.63 juta untuk Suriah di bidang yang sama pada tahun yang sama. Perbedaan jumlah dana yang dihabiskan oleh pemerintahan AS menunjukkan urgensi AS terhadap Suriah dibanding Nigeria, yang dinilai mempraktekkan demokrasi dengan lebih baik dibandingkan Suriah.

Dari dua grafik di atas berikut penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa kurangnya demokrasi di Suriah dibandingkan di Nigeria memperkuat alasan AS untuk melakukan usaha pendirian institusi pemerintahan yang lebih demokratik dan juga dapat menjelaskan kecondongan kebijakan AS ke Suriah dan ISIL dibandingkan ke

Nigeria dan Boko Haram. Eksistensi Boko Haram, sayangnya tidak membuat AS benar-benar terjun untuk ikut melakukan usaha kontraterorisme. Kebijakan dan keterlibatan AS yang sangat condong ke ISIL dibandingkan ke Boko Haram, menurut penjelasan-penjelasan di atas, masuk akal sehingga hipotesis penulis yang menyatakan bahwa AS ingin mengganti rezim Al-Assad ke rezim yang lebih demokratis, terbukti benar. Meskipun begitu, AS seharusnya terlibat lebih jauh dalam usahanya untuk mengeliminasi ancaman terorisme di Nigeria, seperti komitmen AS dalam *global war on terrorism*.

Dari pernyataan dan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa sikap AS yang bersikeras menginginkan diturunkannya Assad dari jabatannya dan didirikannya institusi pemerintahan yang demokratik di Suriah di dorong oleh keinginannya untuk menjaga perdamaian global dan menyebarkan paham demokrasi, yang sejalan dengan teori liberal internasionalisme. Meskipun begitu, melalui penelitian ini, selain penulis menemukan bahwa tujuan AS untuk melakukan pergantian rezim di Suriah didasari oleh keinginannya untuk menyebarkan demokrasi dengan landasan teori liberal internasionalisme terbukti benar, penulis juga kemudian menemukan bahwa ada tujuan yang lebih penting, yakni kontraterorisme ISIL. Tidak dapat dipungkiri AS menginginkan adanya demokrasi di Suriah agar perang sipil dapat berakhir dan stabilitas di Suriah kembali tercapai, tetapi penting pula untuk mengingat bahwa AS beranggapan kontraterorisme ISIL dan penggulingan Assad dari jabatannya harus berjalan beriringan. Jika Assad telah dicopot dari jabatannya sebagai pemimpin

tertinggi Suriah, proses transisi sistem pemerintahan yang otoriter ke demokratis menjadi lebih mudah, yang otomatis akan mempermudah AS dalam usaha kontraterorisemenya terhadap ISIL.

### **4.3 Kesimpulan**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai kebijakan AS di Suriah dari sudut pandang liberal-internasionalisme dan berusaha membuktikan hipotesis kedua penulis, yang kemudian terbukti benar. AS yang menganut sistem liberal-demokratis dengan landasan kebijakan luar negeri yang liberal, menganggap bahwa dengan mengganti rezim Assad ke rezim yang lebih demokratis akan mengamankan kepentingan nasional mereka dan menjaga stabilitas regional dan internasional. Hal ini didukung oleh urgensi AS untuk segera menyelesaikan perang sipil sebagai langkah untuk mewujudkan kontraterorisisme terhadap ISIL.